

# INDONESIA

MADJALAH KEBUDAJAAN

*Indek Pengikat Buku*  
Keputusan PERDA DJAKARTA RAYA  
DAN SEMARANG TGL. 1 NOPEMBER  
No. 191/1960.



DJANUARI-PEBRUARI-MARET 1960, TAHUN XI NO. 1

*Atomo*

## KONFRONTASI DENGAN PIKIRAN-PIKIRAN KEBUDAJAAN INDONESIA DEWASA INI

SEDJAK Kongres Kebudayaan di Magelang ditahun 1948 semakin kuatlah ketjenderungan dalam masyarakat kita untuk nemikirkan kebudayaan sebagai masalah bangsa, meskipun arah jang sedemikian itu telah kelihatan didjaman Pergerakan Nasional sebelum perang. Djika kita melihat ketjenderungan<sup>2</sup> itu maka tidaklah sjak lagi, bahwa hal itu mempunjai pertalian jang erat dengan pergolakan bangsa kita jang hendak menjusun masyarakatnja menjadi suatu masyarakat jang merdeka untuk mentjapai tjita<sup>3</sup> kebahagiaan bangsa. Djadi kita melihat sedjak sebelum perang masalah kebudayaan itu tidak sadja dipikirkan oleh para terpeladjar jang tidak berpolitik, tetapi lebih<sup>4</sup> oleh para pemimpin pergerakan, seperti Dr Sutomo, Ki Hadjar Dewantoro, dsb. maka tidaklah terlalu absurd djika disini kita menarik suatu kesimpulan, bahwa setiap perdjuaan jang bersifat politik tanpa landasan kebudayaan, dengan perkataan lain, bahwa setiap revolusi politik tanpa berbarengan dengan revolusi kebudayaan, tidak akan mentjapai tujuannya. Oleh karena itu tidak terlalu sukar dipahami, bahwa gelombang dahsjat jang kini sedang membawa kita kepada suatu kebudayaan nasional tidak dapat dilepaskan dari Manifesto Politik Pemerintah dan Dekrit Presiden untuk kembali berlaku-UUD-1945. Adalah senantiasa, bahwa revolusi politik itu harus didasari ataupun didampingi dengan revolusi kebudayaan. Umpamanya di Perantjis revolusi 1789 tidaklah mungkin dapat dibayangkan seandainya Reusseau dan Voltaire tidak bekerdja lebih dulu untuk memberikan landasan kepada revolusi itu. Demikian djuga revolusi Rusia ditahun 1917 tidaklah dapat dibayangkan seandainya Lenin tidak bekerdja lebih dulu untuk memberikan landasan kepada revolusi itu. Oleh sebab itu mengertilah kita sepenuhnya, bahwa disekitar tahun 1935 terdjadi pertemuan dan persimpang-siuran pikiran<sup>5</sup> tentang kebudayaan. Bahwa pikiran<sup>6</sup> itu tidak menentu arahnja hal itu adalah soal lain, tetapi sebagai fenomen kita lihat, bahwa keperluan akan pikiran<sup>7</sup> tentang kebudayaan telah dirasakan oleh para pemimpin kita pada waktu itu sebagai keperluan untuk mempersiapkan Indonesia Merdeka, dan malahan sedjarah telah mentjatat, bahwa pikiran<sup>8</sup> tentang kebudayaan itu telah dirasakan sebagai keperluan untuk mempersiapkan revolusi Indonesia. Sebagaimana kita ketahui pikiran<sup>9</sup> tentang kebudayaan itu jang telah berusaha saling bertemu adalah sebagai landjutan dari Kongres Perguruan Nasional jang mempersoalkan masalah pembaharuan kebudayaan dan pelarasan atau penjesuaian dengan djaman baru, dengan tema bagaimanakah sikap kita menghadapi kebudayaan Barat <sup>1)</sup>. Melihat, bahwa idee<sup>2</sup> tentang revolusi pada waktu itu tidak diperdengarkan dan pikiran atas pandangan sedjarah jang mendalam boleh dikatakan tidak ada, maka

1) P.J. Zoetmulder, *Cultuur Oost en West*, Amsterdam, 1951, p. 5.

barangkali memang sulit untuk menjebut, bahwa Kongres Perguruan Nasional itu hendak mempersiapkan suatu revolusi. Namun sampai sedjauh itu hendaklah kita tidak terlalu tergesa-gesa untuk melemparkan sesuatu dakwaan, bahwa bangsa kita disaat itu tidak memiliki radikalisme dalam idee dan pikiran. Suatu pendekatan jang mendukung simpati kiranja lebih sejogjanja, bahwa bangsa kita, artinja inteligensia kita sebagai inti bangsa, tidak dengan sangat sadar mempersiapkan revolusi Indonesia dengan idee<sup>2</sup> kebudajaan. Akan tetapi setjara intuitif toh telah dirasakan, betapa daruratnja menghubungkan tjita<sup>2</sup> kemerdekaan bangsa dengan tjita<sup>2</sup> kebudajaan. Hanja sajang, bahwa pertemuan<sup>2</sup> antara pikiran<sup>2</sup> tentang kebudajaan itu jang merupakan bagian penting dari sedjarah perebutan kembali kemerdekaan bangsa tidak berdjalan lantjar, malahan terlampau berlarut-larut, karena mungkin disebabkan oleh perasaan intuitif jang kurang tadjam terhadap nilai<sup>2</sup>nja, sehingga banjak tertinggal oleh arus sedjarah jang dinamik. Dalam djaman revolusi dan kemerdekaan diusahakanlah lagi pertemuan antara pikiran<sup>2</sup> tentang kebudajaan itu, bukan hanja sekali dua, melainkan berkali-kali. Kita dapat mentjatat, bahwa ditahun 1948, mereka berkumpul di Magelang, ditahun 1951 di Bandung, ditahun 1954 di Solo dan ditahun 1957 di Den Pasar. Djika dalam pertemuan<sup>2</sup> itu masih djuga tidak disadari eratnja pertalian antara nilai<sup>2</sup> revolusi dan nilai<sup>2</sup> kebudajaan, maka sedjarah akan mengulang hasil jang sama. Dan dalam keadaan jang sangat ber-larut<sup>2</sup> itu, mungkin kita akan membenarkan apa jang dimaksudkan oleh Herbert Read dengan "To Hell with Culture" <sup>2</sup>).

#### FENOMEN KEBUDAJAAN

Oleh karena djustru perkataan revolusi kebudajaan itu teramat penting, maka pendekatan kepada fenomena kebudajaan itu sebagai langkah pertama adalah jang paling duluan harus dilakukan. Apa jang tidak dapat disangkal dari suatu kenyataan jang ditundjukkan oleh fenomena kebudajaan itu ialah, bahwa kebudajaan itu adalah peristiwa jang ditjptakan dan dialami oleh manusia. Setjara fenomenologik maka kebudajaan itu tidaklah lain daripada dunia jang telah disusun, jang telah dikonstitusikan. Dan hanjalah manusia jang sanggup mengkonstitusikan dunia itu. Oleh karena itu tjiri<sup>2</sup> kebudajaan adalah tersusunja segala sesuatu. Sesuatu benda atau barang tidak mungkin mengambil bagian dalam kebudajaan, walaupun hanja setjara objektif sadja, apabila tidak berhubungan dengan sesuatu benda atau barang lain. Misalnja suatu barang, sebutlah barang itu kapas, apabila kapas itu tidak berhubungan dengan barang lainja, maka tidaklah mungkin kapas itu disebut mengambil bagian didalam kebudajaan. Bila kapas itu telah tersusun, teratur, mendjadi suatu kertas umpamanja, maka kapas itu telah mengambil bagian dalam kebudajaan. Tetapi haruslah didjelaskan setjara teknik, bahwa pengertian „berhubungan dengan barang lain“ hanjalah dalam arti konstitusional, sehingga arti „berhubungan dengan barang lain“ disini adalah „ber-sama<sup>2</sup> barang lain merupakan suatu susunan jang teratur, susunan mana dikerdjakan oleh manusia menurut makna dan keperluannja“. Dengan demikian kenyataan, bahwa kapas berhubungan dengan kulitnja, dengan tangkainja, dsb. bukanlah suatu hubungan konstitusional, bukanlah suatu hubungan jang disusun, melainkan suatu hubungan alamijah, organik, dsb. Djadi lebih tepatlah bila dikatakan, bahwa hubungan itu tersusun, dan hubungan jang tersusun itu timbul dari kondisi hidup manusia. Sebagaimana barang itu berhubungan dengan barang lain sebagai suatu hubungan jang tersusun, dengan perkataan lain, barang itu tidak dapat lepas dari barang lain, demikian pula halnja

<sup>2</sup>) Herbert Read, *The Politics of the Unpolitical*, London, 1946, p.p. 47-73.

manusia jang mengerdjakan susunan itu, ia menjusun suatu hubungan konstitusional menurut makna dan keperluannya, sehingga mau tak mau ia harus berhubungan dengan orang-lain. Djika ia menjusun barang<sup>2</sup> itu menjadi suatu susunan jang teratur, umpamanya ia menjusun dari sebuah kertas kosong menjadi sebuah kertas jang mengandung djuga oleh orang-lain. Dalam hal demikian disebutlah, bahwa susunannya itu, jaitu sebuah lukisan jang terdiri dari sebuah kertas, tjoret<sup>an</sup> tjat, dsb. mengandung makna, artinya si penjusun ingin menjampaikan sesuatu kepada orang-lain tentang kenjataan jang telah dialaminya, umpamanya ia melukis seorang wanita, si pelukis ingin memberitahukan kepada orang-lain tentang perhatiannya kepada seorang wanita jang pernah dilihatnja. Akan tetapi djika seorang meng-garis<sup>kan</sup> tjat pada sebuah kertas tanpa maksud sesuatu apa, tjoret<sup>annya</sup> itu djadilah, akan tetapi tidak bermakna, atau ia dapat men-tjoret<sup>kan</sup> tjat<sup>nya</sup> dengan mengandung sesuatu makna, umpamanya ia ingin menunjukkan perhatiannya kepada sebuah gunung jang terbentang djauh dihadapannya, dilukisnja gunung itu, tetapi kemudian sebelum ia selesai melukis ia tidak tertarik lagi, dimoreng-morengnja lukisannya itu, sehingga n.akna-makna bertentangan dalam diri si pelukis itu, maka dalam hal, bahwa seseorang berbuat sesuatu tanpa makna, atau seseorang berbuat sesuatu dengan makna<sup>2</sup> jang saling bertentangan, disebutlah, bahwa orang itu melakukan sesuatu jang absurd. Sesuatu jang absurd setjara subjektif tidak dapat mengambil bagian dalam kebudayaan, akan tetapi bisa setjara objektif, umpamanya seseorang jang menjampaikan kepada orang lain, bahwa orang jang pertama itu sedang diliputi oleh perasaan absurd.

Dari beberan ini kesimpulannya ialah, bahwa segala sesuatu itu dapat mengambil bagian setjara objektif didalam kebudayaan, didalam peristiwa kemanusiaan apabila segala sesuatu itu tidak bersifat as sich, melainkan bersifat für sich. Dalam berhadapan stjara für sich dengan manusia, maka alam atau bagian alam disusun menjadi suatu hubungan jang tersusun untuk mengambil bagian dalam hidup manusia jang penuh mengandung makna, seperti kita lihat seorang petani jang hendak mentjangkul sawahnja, ia menjusun tjangkulnja dari sebatang kaju dengan sebuah badja jang tadjam, sehingga dengan lebih mudah ia dapat mentjangkul sawahnja. Lambat-lau'n bila manusia sesudah lebih maju dalam menghadapi alam objektifnja maka ia menemukan akal untuk meluku sawahnja itu setjara lebih praktik, dengan seekor atau dua ekor kerbau jang menarik lukunja, dan kemudian bila kemajuan teknik sudah bertambah, maka manusia menemukan traktor untuk keperluannya setjara lebih modern. Dari sedjarah perkembangan teknik manusia itu, maka senantiasalah manusia ingin membebaskan diri dari alam, djika dahulu untuk mentjangkul sawahnja ia mempergunakan tjangkul jang sangat sederhana, lalu semakin bertambah praktik sampai kemudian menemukan traktor, maka manusia sebagai daja alam atau djasmaniah makin diperingankan bebannya, dengan perkataan lain, manusia membebaskan diri dari alam dan ini disebut, bahwa manusia berusaha melakukan transendensi terhadap alam, jaitu menerdjang keluar batas alam untuk menemukan hakikat dirinja sebagai machluk kebudayaan. Akan tetapi hal ini tak berarti bahwa manusia berusaha mengingkari dirinja sebagai bagian dari alam, meskipun tidak seluruhnja merupakan bagian alam itu, tidak, manusia tetap merealisasikan dirinja, bahwa sebagian dari dirinja adalah bagian alam, akan tetapi jang hendak ditjapai oleh manusia ialah seperti dikatakan oleh Bergson manusia ingin meratakan djalan hidup jang dirintangtangi oleh materi.

#### TJITA-TJITA KEBUDAJAAN DALAM PERBURUHAN

Sebagaimana kita ketahui kebudayaan itu adalah suatu proses pengaturan atau "ordering" dari alam oleh manusia. Perjuangan melawan alam tidaklah mengandung

implikasi, bahwa manusia hendak membinasakan alam, melainkan hanjalah hendak memberikan isi yang berupa makna dalam alam itu. Ini berarti, bahwa manusia mengatur, menjusun, menata alam. Umpamanya manusia merombak suatu hutan menjadi kota, sebagai dalam jaman dahulu kita melihat berdirinya kota Majapahit atau Jogjakarta. Hutan<sup>2</sup> itu kita rombak, lalu kita dirikan rumah demi rumah, kita bentangkan jalan, dsb. Kita telah menjusun alam menjadi lain, karena dengan penjusunan itu kita mengisikan makna<sup>2</sup> insani kita, kita ingin mendirikan suatu negara. Demikianlah umpamanya kita ingin melakukan pembangunan<sup>2</sup> raksasa, kita ingin membentangkan jembatan<sup>2</sup>, terusan<sup>2</sup>, dsb. atau kita ingin mendirikan pabrik<sup>2</sup>, mengadakan industrialisasi, dsb. Hal itu semuanya memperlihatkan bahwa kita menundukkan makna insani kita dalam suatu proses alam yang mengandung perubahan<sup>2</sup>.

Sudahlah semestinya apabila kesemuanya itu tidak dapat dilakukan oleh seorang diri, melainkan kesemuanya dilakukan oleh suatu kesatuan sosial. Kita tidak dapat melakukan pembangunan dengan seorang diri, kita tidak dapat mengadakan produksi dengan seorang diri, melainkan kesemuanya itu kita lakukan ber-sama<sup>2</sup>. Dari sinilah lahirnya masalah perburuhan dan sosial, suatu masalah yang senantiasa menggoda kita, sedjak dahulu hingga sekarang. Perjuangan disekitar masalah perburuhan dan sosial ini pada hakikatnya adalah perjuangan disekitar kebudayaan sebagai suatu proses sosial. Dalam proses sosial inilah diperjuangkan, bahwa manusia harus tetap merupakan pengolah atau pengatur alam dan tidak sebaliknya manusia jangan menjadikan objek kebudayaan, paling sedikit ia harus merupakan subjeknya, yang mengatur dan yang hendak menguasai alam. Dalam jaman dahulu, disaat feodalisme merupakan sistem sosial yang dianut oleh manusia, maka buruh atau pekerdja tidaklah jarang merupakan sekedar alat untuk mengatur alam yang akan mendukung makna si tuan tanah, si buruh atau si pekerdja itu tidak mempunyai makna sendiri, dan dalam keadaan yang demikian itulah disebut, bahwa situasi sosial yang demikian itu menjatakan suatu perbudakan. Djika dalam pertengahan yang kedua dari abad ke-18 di Perancis meletus suatu revolusi, hal itu disebabkan oleh karena manusia hendak kembali kepada dirinya sebagai subjek dan tidak sebagai objek kebudayaan. Dalam kebudayaan djika kita berbitjara tentang objek maka yang dimaksud ialah alat sebagaimana kita mempergunakan sapi atau kerbau sebagai alat, sebagai objek kebudayaan. Demikianlah umpamanya situasi sosial yang hendak menimbulkan suatu absurditas (makna yang tidak keruan) dikalangan subjek<sup>2</sup> kebudayaan, hingga merupakan objek<sup>2</sup> kebudayaan itu pernah dilukiskan oleh Gilbert Gadoffre tatkala menganalisis krisis demokrasi sebagai gambaran dari krisis abad ke-20 ini <sup>3)</sup>. Dalam analisisnya itu dikemukakannya, bahwa kegagalan sistem sosial yang ditijptakan oleh liberalisme antara lain disebabkan oleh karena tidak dapat dipertanggungjawabkannya pemakaian kapital, sehingga jurang yang makin lebar dan mendalam terus-menerus terjadi antara buruh dan madjikan, dengan perkataan lain, tidak ada tanggungjawab yang membawa keadilan kaum buruh. Disamping itu sistem sosial yang ditijptakan oleh liberalisme telah gagal karena tidak dapat dipertanggungjawabkan sistem persaingan, karena sistem persaingan yang dimaksudkan untuk mentjegah monopoli, malahan menuju kearah monopoli dan membawa suatu penjakit sosial, jaitu mentijptakan industri<sup>2</sup> perang, sebagaimana ternjata dalam sedjarah umat-manusia dalam abad ke-20 ini yang mengenal dua perang dunia. Djika Gadoffre sampai kepada suatu kesimpulan, bahwa faktor<sup>2</sup> inilah yang menjeret manusia kedalam suatu krisis demokrasi, sehingga timbullah ekstremisme<sup>2</sup> dari demokrasi dalam pendjel-

<sup>3)</sup> G. Gadoffre, *Vers le style du XXe siecle*, Paris, 1945, pp. 29-30.

maannya jang berupa totalitarisme kiri disatu pihak dan totalitarisme kanan dilain pihak hal itu mudahlah dipahami. Dalam mengikuti proses ditinggalkannya demokrasi dan diperolehnja bentuk<sup>2</sup> jang sangat ekstrem dari demokrasi ini maka kita akan senantiasa teringat kepada Herbert Read jang menjatakan, bahwa kelemahan demokrasi terletak dalam kenyataan, bahwa demokrasi itu memiliki suatu "physical impossibility", sehingga meskipun kita dapat memperoleh suatu pemerintahan dari rakjat, malahan suatu pemerintahan untuk rakjat, akan tetapi menurut Herbert Read kita tidak mungkin memiliki suatu pemerintahan oleh rakjat. Hal ini telah terbukti dalam sedjarah jang dijelaskan dalam mythes tentang Prometheus, suatu mythes jang menggambarkan pertegangan antara napsu meninggalkan kemanusiaan dan kembali kepada kemanusiaan. Kronos jang karena tidak memberikan kemungkinan kepada kemandjuaan dunia digulingkan oleh Zeus dengan bantuan Prometheus, akan tetapi setelah Zeus menggantikan Kronos iapun mempunjai kebidjaksanaan jang tidak seberapa bedanja, ia telah meninggalkan kemanusiaan, dan sebagai reaksinja Prometheus menantang kebidjaksanaan ini, ia ingin kembali kepada kemanusiaan. Prometheus adalah suatu mythes jang dalam abad<sup>2</sup> jang terachir ini, terutama dalam abad ke-20 merupakan tema dari kesusastraan Barat, pemberontakan manusia melawan anaeir anti-manusia. Lebih hebat dan seram lagi orang Barat menggambarkan pertegangan ini dalam mythes tentang Oidipous, dengan menggambarkan, bahwa Oidipous, anak Radja Thebe jang dibuang oleh orang-tuanja sendiri, karena dewa<sup>2</sup> meramalkan, bahwa anak ini kelak membunuh ajahnja sendiri. Oidipous kemudian setelah membunuh ajahnja sendiri tanpa disadarinja, bahwa kurbannya itu adalah ajahnja sendiri, lalu membunuh seekor sphinx jang selama itu sangat mengerikan rakjat Thebe dan setelah itu Oidipous mendjadi radja. Tetapi keradjaannya mendjadi katjau-balau, bumi mendjadi tandus, hewan<sup>2</sup> pada mati, penjakit<sup>2</sup> makin meradjalela, dsb. dan dewa<sup>2</sup> meramalkan, bahwa segala malapetaka itu akan lenjap, apabila pembunuhan ajah Oidipous diketemukan dan dibuang atau dibunuh. Disini kita melihat, bahwa Oidipous jang diangkat mendjadi radja, karena sebagai pahlawan ia telah dapat membunuh seekor sphinx jang merupakan antjaman maut bagi rakjat, tetapi sebaliknya dengan naiknja ketachta keradjaan ia merupakan sumber dari malapetaka rakjatnja. Hal ini menundjukkan suatu ambivalensi manusia, disatu pihak ia seorang pahlawan, dilain pihak ia seorang pengchianat. Tidaklah terlalu djanggal karenanja apabila orang memperdengarkan suatu konflik antara manusia disatu pihak dan kemanusiaan dilain pihak. Apabila kemanusiaan tidak berhasil menguasci manusia, malahan sebaliknya kemanusiaan dikuasci oleh manusia, maka akan timbullah suatu fenomena, bahwa manusia akan meninggalkan demokrasi, karena demokrasi merupakan pernjataan dari inti jang terdalam dari kemanusiaan itu. Apabila hal itu terdjadi, maka jang kita lihat kemudian ialah, bahwa manusia dengan tidak disadarinja mendesakkan dirinja kedalam suatu ekstremisme.

### DEMOKRASI SEBAGAI MASALAH KEBUDAJAAN

Teranglah disini, bahwa persoalan jang sesungguhnya tidaklah lain daripada persoalan kebudajaan. Djika dalam suatu masjarakat dipergunakan suatu sistem sosial jang konsekwsinja mentjiptakan suatu keadaan sosial, dimana banjak manusia hidup sebagai objek<sup>2</sup> kebudajaan, maka sistem sosial tersebut tidaklah mungkin mewakili suatu demokrasi. Apabila suatu masjarakat menghendaki dirinja terlalu demokratik, maka masjarakat tersebut sebagaimana kita peladjar dalam sedjarah pada hakikatnja bukanlah suatu demokrasi lagi. Perang<sup>2</sup> dunia dalam abad ke-20 ini petjah oleh karena masjarakat Barat menghendaki masjarakat jang terlalu demokratik. Demokrasi bukanlah suatu ekstremisme dan oleh karena itu tepat sekali apabila Herbert Read berkata, bahwa

tidak benarliah adanja alternatif se-akan<sup>2</sup> kita hanja menghadapi dua djalan pada suatu "driesprong", djalan jang pertama demokrasi, djalan jang kedua bukan demokrasi, umpamanja Fasisme <sup>4</sup>). Suatu demokrasi liberal dapat merupakan suatu contradictie in terminis, jaitu apabila kaum liberal jang hendak mentjiptakan demokrasi itu menghendaki suatu masjarakat jang terlalu demokratik. Belumlah djelas kenjataan<sup>2</sup> jang diadjar kan oleh sedjarah di Perantjis sebagai akibat dari revolusi demografik, revolusi perpindahan penduduk dari desa<sup>2</sup> ke-kota<sup>2</sup> industri jang mengakibatkan timbulnja keadaan proletariaat, kaum buruh jang bekerdja se-hari<sup>2</sup>an sekedar untuk memberi makan anak isterinja, tetapi mereka kaum buruh itu tidak berhasil dalam usahanja sebagai subjek<sup>2</sup> kebudajaan menghadapi alam-semesta jang lengkapnja ini, karena mereka sama sekali tidak mempunjai kegembiraan bekerdja, hanja setjara formal sadja mereka itu memiliki kebebasan, tetapi dalam materialnja mereka itu kehilangan kebebasan. Dan adalah ini jang merupakan tema sedjak djaman dahulu hingga sekarang jaitu masalah kebebasan dan ketidakbebasan dalam hubungan sosial. Adanja persaingan atau rivalitas kelas, dahulu antara kelas feodal dan kelas tengahan, sekarang antara kelas tengahan dan kelas buruh, dst. menundjukkan, bahwa manusia sebagai buruh bukan sekedar untuk mentjari sesuap nasi sadja, tetapi lebih daripada itu untuk menunaikan kewadjabannja sebagai manusia, jaitu untuk bertindak terhadap alam disekelilingnja tidak sebagai objek melainkan sebagai subjek kebudajaan. Perdjjuangan itu, jaitu perdjjuangan untuk merebut diri kita kembali sebagai subjek kebudajaan, dengan sengitnja masih berlangsung terus, karena persoalan jang fundamental bagi kaum buruh bukanlah hanja persoalan ekonomi, tetapi lebih dalam daripada itu adalah persoalan kebudajaan. Djika kaum buruh dalam perdjjuangannja se-hari<sup>2</sup> tidak dapat memahami persoalan jang fundamental ini, maka dibawah pimpinan jang kurang menjangkau wawasan kebudajaan mereka akan terbentur kepek pada ilusi<sup>2</sup> jang sangat pahit. Dalam keadaan sebagai negara kita umpamanja memang se-akan<sup>2</sup> belum terasa kesitu persoalan kaum buruh kita, karena pada umumnya kita masih berpendapat, bahwa aspirasi kaum buruh hanjalah kesedjahteraan perut dan se-akan<sup>2</sup> tidak ada persoalan lain. Seorang buruh jang pendapatannja setiap bulannja tidak dapat memenuhi keperluan ekonomi keluarganja se-akan<sup>2</sup> hanja mempunjai keperluan ekonomi keluarganja itu sebagai tudjuannja jang terachir. Pandangan jang sedemikian tidak dapat dibenarkan oleh mereka jang mengetahu hakikat kebudajaan, sebagaimana „perburuhan“ seekor sapi atau kerbau jang diharuskan meluku sawah, melainkan djustru hendak mendjundjung manusia kemartabatnja jang semakin lebih tinggi, jaitu sebagai manusia, sebagai subjek kebudajaan, jang mengatur dan menguasai alam-semesta ini. Djika kita tidak sampai kepada wawasan ini, maka kita akan terbentur kepada keadaan sosial jang lebih menjedihkan daripada keadaan sosial dalam djaman liberal. Djika seekor sapi atau kerbau meluku sawah dan atau kerbau itu mendapat perumahan, makan dll. setjukupnja, malahan lebih daripada tjukup, tetapi sapi atau kerbau itu tidak mungkin merealisasikan dirinja sebagai subjek<sup>2</sup> kebudajaan. Oleh karena itu masjarakat demokrasi harus mendjaga dirinja djangan sampai ke-demokratik<sup>2</sup>an, karena dapat melemparkan dirinja dalam suatu ekstremisme jang sekalipun sebagai reaksi terhadap ekstremisme lain daripada demokrasi.

Disini tidak perlu kiranja diterangkan lagi, bahwa demokrasi merupakan inti daripada kebudajaan. Bagaimana pelaksanaan ini telah ditundjukkan oleh sedjarah perburuhan jang persoalannja bersentralkan pada psyche atau djiwa si buruh atau pekerdja, suatu masalah tentang kebebasan dan pembebasan, jang hingga kini masih tetap aktual. Perburuhan itu jang telah mempunjai sedjarahnja puluhan abad ternjata merupakan

<sup>4</sup>) Herbert Read, *The politics of the unpolitical*, London, 1946, p. 4.

aspek penting sekali dari kebudayaan ditinjau setjara fenomenologi.

## KEBUDAJAAN SEBAGAI TOTALITAS

Ketika dalam pertengahan tahun<sup>2</sup> tigapuluhan di Djakarta berlibatan polemik kebudayaan timbullah kesimpulan<sup>2</sup> yang merumuskan se-akan<sup>2</sup> kebudayaan Barat itu mempunyai sifat yang bertentangan dengan sifat kebudayaan Timur, jaitu dengan menjatakan bahwa kebudayaan Barat itu dinamik sifatnja, sedang kebudayaan Timur itu statik sifatnja. Dalam polemik itu dengan struktur berpikir yang sama diusahakannya untuk mendamaikan kedua kebudayaan itu dalam sintesis. Djika kita menghubungkan pendapat<sup>2</sup> yang kelihatannya per-beda<sup>2</sup> itu tentang kebudayaan dengan kenyataan yang ada, baik di-negeri<sup>2</sup> Barat sendiri, maupun dinegeri kita, akan tampaklah, bahwa persoalan-nja orang tidak melihat kenyataan itu sebagai evidensi yang langsung. Pada hakikatnja tidak mungkinlah ada sesuatu kebudayaan yang statik, karena setiap kebudayaan senantiasa dinamik, mengingat, bahwa kebudayaan merupakan suatu proses dalam sedjarah. Oleh karena itu kebudayaan itu senantiasa mengandung tendensi untuk melenjapkan segala yang asing, dengan perkataan lain, kebudayaan itu merupakan suatu totalitas, artinya kebudayaan itu menjusun suatu dunia insani, dalam mana tidak lagi terdapat pertentangan. Adalah djalan sedjarah yang senantiasa berusaha se-kuat<sup>2</sup>nja untuk menghilangkan atau menyelesaikan setiap pertentangan, akan tetapi segera pertentangan itu bisa diselesaikan, maka menjusul pertentangan berikutnya. Inilah yang merupakan inti dari dialektik sedjarah itu, dan djustru karena pertentangan sebagai tantangan diselesaikan dengan penjelesaian pertentangan itu sebagai djawabannya, maka djawabannya itu akan segera disambut oleh suatu kekuatan baru yang menimbulkan pertentangan baru dan demikianlah memang hakikat dari sedjarah itu yang senantiasa mempunyai tendensi total, meluas, bagaikan ombak samudera yang memukul pantai; djika sedjengkal tanah telah dipetjahkan, maka ombak itu akan segera datang lagi untuk memukul djengkal tanah berikutnya. Itulah ibarat dari perdjjuangan manusia dalam membentangkan sedjarahnja dalam rupa kebudajaanja sebagai proses yang total. Padamulanja manusia yang tertjampak di-tengah<sup>2</sup> alam sekitarnja merasa dirinja menghadapi barang<sup>2</sup> yang asing, karena bellum merupakan totalitasnja, tetapi segera ia berhasil mengatur alam sekitarnja itu ia menjadikan barang<sup>2</sup> yang asing menjadi tidak asing lagi, maka disebutlah, bahwa manusia berusaha melenjapkan segala yang asing. Perasaan asing kita pada suatu tempat dan ketika ditandai oleh objek kita yang belum menjalankan fungsinya sebagai penghubung sosial, dengan perkataan lain, diri kita merasa asing karena kita tidak bersatu dengan orang-lain. Dalam kondisi yang demikian itu kita adalah asing terhadap orang-lain itu, sebaliknya kita djuga bisa mengatakan, bahwa kita adalah asing bagi orang lain itu. Umpamanya pada suatu hari kita menjaksikan suatu sandiwara yang kotjak, disamping kita ada dua orang-lain yang kita baru pertama kali itu melihat mereka. Pada suatu adegan yang sangat kotjak pada saat itu kita tertawa ter-pingkal<sup>2</sup>, akan tetapi kita melihat djuga, bahwa dua orang-lain yang belum kita kenal itu djuga tertawa ter-pingkal<sup>2</sup> seperti kita. Andaikata kita mengenang mereka itu kita, sementara kita tertawa ter-pingkal<sup>2</sup> itu, dapat menj-tjablek<sup>2</sup> bahu mereka sebagaimana kalau kita melakukan suatu kelakar atau senda-gurau, akan tetapi kita tidak dapat menjjalankannya yang demikian itu, karena kita belum mengenal mereka. Kita ingin memberitahukan kepada mereka, bahwa pertudjukan itu sangat kotjak dan mungkin mereka itu ingin pula memberitahukan kepada kita hal yang sama. Demikianlah perasaan asing itu mengungkung diri kita. Dan pada saat kita tidak bisa lagi menguasai diri kita itu, maka meskipun kita tidak mengenal mereka itu kita akan ber-bitjara kepada mereka. Dalam hal yang sama, kita dapat menjjeritakan, bahwa pada

saat seorang pemuda tertarik hatinya oleh seorang gadis yang baru pertama kali itu dilihatnya, maka pada diri pemuda itu timbullah suatu perasaan asing. Ia ingin membebaskan perasaan asing yang mengungkung dirinya itu, karena itu ia terus langsung saja berbitjara dengan gadis itu. Djika ia tidak berani berbuat demikian, maka ia akan meminta bantuan pihak ketiga untuk memperkenalkannya. Bukankah tepat apa yang dikatakan oleh Walt Whitman :

*Stranger, if you passing meet me and desire to speak to me,  
why should you not speak to me?  
And why should I not speak to you? <sup>5)</sup>*

Maka bukan tidak berdasarkan kenyataan, apabila Marcel berkata, bahwa hakikat saja terdapat didalam engkau <sup>6)</sup>, karena seorang engkau adalah seorang ia alias seorang asing yang telah dikenal, seorang asing yang telah diperangi keasingannya dan dengan seorang saja bersama<sup>2</sup> telah merupakan suatu totalitas. Lihatlah umpamanya seorang asing yang baru kemarin tiba di Djakarta, yang ketika itu sedang mengendarai mobil untuk menjari kenalannya di Kebajoran. Tetapi ia rupanya tersesat, karena ia sampai dikota dan karena ia merasa, bahwa ia tersesat itu, maka ia menghentikan mobilnya dan sambil menengok dari jendela mobilnya itu ia bertanja kepada seorang yang kebetulan sedang berdiri dipinggir djalan, orang itu belum pernah dikenalnya, tetapi orang asing itu bertanja: "Excuse me, do you speak English?" suatu kalimat pertama untuk membuka suatu pertemuan dengan orang-lain. Andaikata tidak perlu, umpamanya orang asing itu telah mengetahui sendiri djalan yang menudju ke Kebajoran, maka ia tidak akan bertanja kepada orang-lain yang belum dikenalnya itu. Djelaslah, bahwa pertemuan itu senantiasa disebabkan oleh karena keperluan: hanjalah kalau perlu orang itu berbitjara dan djustru dalam keperluan inilah letaknya makna insani yang merupakan hakikat dari segala kebudayaan itu, berapa djugapun ketjilnya makna itu.

#### KEBUDAJAAN SEBAGAI DIALOG

Dalam hal yang demikian inilah kita memerlukan suatu bahasa dan adalah bahasa itu merupakan fungsi sosial pula, karena itu merupakan aspek kebudayaan yang penting sekali. Sebagaimana setiap kebudayaan itu akan bermula dan berachir dengan manusia, maka oleh pentingnya aspek kebudayaan dalam rupa bahasa ini seringkali penggunaan bahasa yang salah dapat menimbulkan bentjana. Dan ini adalah tragik dari manusia, bahwa beberapa perkataan dari sesuatu bahasa tidak dapat diterjemahkan kedalam bahasa lain. Umpamanya saja dalam tahun<sup>2</sup> tigapuluhan orang Djerman menterjemahkan perkataan Inggris "civil" dengan „Bürger“, sehingga „civil society“ disamakan oleh orang Djerman dengan masyarakat burdjuis, sedang perbedaan antara kedua istilah itu djelas, jaitu dalam "civil Society" setiap anggota masyarakat mendjalankan politik dengan aktif, dengan perkataan lain, setiap anggota masyarakat mengambil bagian dalam kehidupan politik setjara bertanggung djawab, sedang dalam masyarakat berdjuaasi atau "bürgerliche Gesellschaft" tidak setiap anggota masyarakat mendjalankan politik dengan aktif, dengan perkataan lain, tidak setiap anggota masyarakat mengambil bagian dalam kehidupan politik setjara bertanggung djawab, me-

<sup>5)</sup> Orang asing, bila engkau bertemu dengan aku ditengah djalan dan ingin berbitjara dengan aku, mengapa engkau tidak akan berbitjara dengan aku?  
Dan mengapa aku tidak akan berbitjara dengan engkau?

<sup>6)</sup> Lihat C.A. van Peursen, *Korte Inleiding in de Existentiephilosophien*, Amsterdam, 1948, p. 34.

lainkan kehidupan itu merupakan *privilege* golongan tertentu jang oleh Herbert Road disebut golongan politik dengan ambisi perseorangan 7).

Dalam hal bahasa itu berbeda tidak sadja dilihat dari sudut kebangsaannya, melainkan djuga dari sudut makna atau artinja, maka perbedaan itu jang menimbulkan suatu situasi asing akan dapat dipetjahkan dengan djalan melakukan suatu dialog. Lagi pula tidak hanja antara bahasa Inggris dan bahasa Djerman terdapat perbedaan itu, tetapi djuga antara bahasa Inggris dan bahasa Inggris sendiri, antara bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia sendiri, dsb. Dalam tahun 1952 tatkala seorang pengarang Perantjis, François Mauriac, dinjatakan oleh Akademi Stockholm sebagai Pemenang Hadiah Nobel untuk sastra, maka terjadilah perselisihan pikiran antara dua orang pengarang Indonesia jang menerima kabar tentang keputusan Akademi Stockholm itu. Pengarang jang seorang dengan herannya mengatakan kepada pengarang jang lain, tentang kedjadian tersebut, jaitu kedjadian keputusan tentang pemberian Hadiah Nobel itu, karena menurut pengarang itu François Mauriac adalah pengarang kelas dua. Mendengar pendapat rekannya ini pengarang jang lain, jang diadjaknja berbitjara itu djustru merasa heran, karena menurut pendapatnja François Mauriac adalah pengarang jang hebat. Perselisihan paham antara kedua pengarang jang sama<sup>2</sup> mempergunakan bahasa Indonesia itu menimbulkan suatu perasaan jang saling mengasingkan. Setelah itu mereka melakukan suatu subdistingsi dalam dialog dan ternyata, bahwa pengarang jang berpendapat, bahwa François Mauriac adalah pengarang kelas dua, sebenarnya belum pernah membuatja sendiri buku<sup>2</sup> Mauriac sebahupun djuga, melainkan ia mengatakan begitu, karena membuatja sebuah tulisan jang nentjela keputusan tentang Hadiah Nobel itu. Dalam hal jang serupa kita dapat menjaksikan pertemuan dua orang pengundjung konser di Gedung Kesenian pada saat istirahat. Kedua orang itu berselisih paham tentang permainan jang dilakukan seorang pianis, karena menurut orang jang seorang permainan itu djelek. Tetapi tatkala orang diadjaknja berbitjara itu menanjakan, dimanakah letaknja kedjelekan itu, maka orang jang berpendapat djelek tadi tidak dapat menundjukkannya, dan kemudian ternyata, bahwa orang itu sebenarnya tidak menguasai musik, ia hanja pura<sup>2</sup> sadja mengetahuinja. Demikianlah dengan mengemukakan subdistingsi dalam dialog sematjam itu perselisihan paham atau perselisihan bahasa itu dapat dihindarkan, dengan perkataan lain, dialog mengikis sedikit demi sedikit anasir asing dari dunia manusia.

Dalam mengadakan kearah<sup>2</sup> terhadap fenomena bahasa ini kiranja pantaslah apabila kita teringat pada apa jang pernah dijatakan Louis van Haecht, bahwa pada hakikatnja bahasa adalah suatu pemberontakan terhadap segala sesuatu jang dipisahkan dari diri kita dan pula suatu pemberontakan terhadap kehadiran segala sesuatu jang asing 8). Pendeknja sebagai fenomena, maka bahasa senantiasa merupakan pemberontakan terhadap segala kesubjektivian, dengan perkataan lain, bahasa senantiasa mengarah kepada keobjektivian. Dan sebagai aspek kebudayaan, maka bahasa itu penting sekali untuk mengambil bagian dalam realisasi bersama terhadap nilai<sup>2</sup> kebudayaan.

#### MEMAHAMI ARTI KEBUDAJAAN NASIONAL

Dalam simposion kebudayaan jang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia di Djakarta baru<sup>2</sup> ini Dr Hurustiati Subandrio dalam referatnja tentang kebudayaan nasional menjatakan, bahwa kebudayaan<sup>2</sup> daerah berkembang kearah kebudayaan nasional. Ini ditentang oleh salah seorang pendebat jang menjata-

7) Herbert Read, *The Politics of the Unpolitical*, London, 1946, p. 1.

8) Louis van Haecht, *Taalphilosophische Beschouwingen*, Leuven, 1947, p. 53.

kan, bahwa kebudayaan<sup>2</sup> daerah itu tidak dapat dilebur kedalam kebudayaan nasional. Ditundukkannya, bahwa tidaklah ada sesuatu seni yang bertjorak nasional, umpamanya pada suatu hari kita melihat sesuatu lukisan dan sengadja nama dan kebangsaan pelukisnya tidak diberitahukan kepada kita, maka sukarlah kita menebak, lukisan apakah itu, lukisan Djepang, lukisan Tionghoa, atautkah lukisan Indonesia. Djika pandangan atau pendirian ini tidak dimaksudkan untuk mengadakan apologi terhadap kebudayaan<sup>2</sup> daerah, melainkan terhadap kebudayaan yang melewati batas kebangsaan, maka hal itu dapatlah dipahami sebagai suatu pendirian yang wajar, suatu pendirian yang melihat kemungkinannya manusia sebagai kenyataan. Dalam hal dua pendirian itu bertentangan, jaitu yang pertama mengemukakan suatu konsep nasional tentang kebudayaan, sedang yang lain mengemukakan konsep internasional tentang kebudayaan, fenomen<sup>2</sup> itu haruslah kita dekati sebagai fenomen<sup>2</sup>. Sesungguhnya kita tidak akan mungkin mengerti kepada kedua konsep yang bertentangan itu apabila kita mempergunakan bahasa yang asing untuk mendekatinya sebagai fenomen.

Djika kita boleh menafsirkan setjara fenomenologik terhadap fenomen konsep nasional tentang kebudayaan, maka terlebih dahulu kita harus mengerti fenomen nasionalisme kita sebagai fenomen sedjarah. Nasionalisme kita sebagai yang dirumuskan oleh pemimpin<sup>2</sup> kita yang dalam permulaan abad ini bergerak dalam dunia pendjadjahan adalah suatu antitesis terhadap suatu burdjuasi asing yang lazimnya disebut dengan imperialisme modern. Oleh karena imperialisme modern ini mentjiptakan suatu keadaan proletariat di Indonesia, maka kesadaran, bahwa tanpa bangsa Indonesia, maka imperialisme modern itu tidak mungkin mentjapai tujuannya, mentjiptakan suatu pengertian nasional, yang sifatnya berlainan dengan perdjjuangan kemerdekaan menentang pendjadjahan sebelum abad ke-20. Kesadaran ini adalah kesadaran nasional yang dijatakan dalam utjapan<sup>2</sup> pemimpin<sup>2</sup> kita supaja kita sebagai rakyat yang ditindas oleh imperialisme modern itu bergerak menghimpun suatu persatuan nasional. Oleh karena itu sifat dari kesadaran nasional ini tidak se-mata<sup>2</sup> oleh kulit kita, oleh ras kita, dsb. melainkan didalamnya terkandung kesadaran sosial dan kebudayaan. Meskipun demikian, kesadaran nasional kita itu bukanlah suatu kesadaran kelas, karena kesadaran nasional itu adalah suatu kesadaran kerakjatan yang timbul oleh pendjadjahan bangsa asing. Berlainan dengan itu adalah kesadaran kelas yang tidak ditunjukkan terhadap bangsa asing, melainkan terhadap bangsa sendiri, jaitu djikalau perdjjuangan sosial atas kesadaran kelas itu masih dalam taraf permulaan, jaitu taraf perdjjuangan nasional. Kesadaran kelas ini bisa timbul setelah perdjjuangan politik atas dasar kesadaran nasional selesai dan apabila perdjjuangan politik itu tidak mengubah kondisi sosial dari masyarakat kebangsaan. Demikianlah dua pendirian ini, jaitu yang pertama berdasarkan kesadaran nasional dan yang terachir berdasarkan kesadaran kelas, njata pula bajangan<sup>2</sup>nja dalam lapangan kebudayaan. Dalam taraf perdjjuangan anti imperialisme modern sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa kita sedjak permulaan abad ini dalam arti tertentu belumlah ada persoalan kesadaran kelas, meskipun tidak diragukan, bahwa sebagian ketjil dari bangsa kita berusaha menentang kekuatan nasional kita. Tetapi bukan mereka itu yang pokok, sebab mereka hanyalah pelajan<sup>2</sup> kaum imperialis, yang pokok adalah kaum imperialis itu. Oleh karena itu persoalan kesadaran kelas sebenarnya terlalu di-tjari<sup>2</sup>, meskipun kita harus mengetahui dengan betul<sup>2</sup> bahwa setiap penggunaan kemenangan yang salah akan menimbulkan imperialisme baru, jaitu imperialisme oleh sebagian ketjil dari bangsa kita yang melupakan prinsip<sup>2</sup> dari perdjjuangan kita yang berdasarkan kesadaran nasional itu. Djika ini terdjadi, maka lahirlah burdjuasi alias imperialisme nasional dan inilah yang akan membuat sedjarah kita mengikuti djedjak sedjarah kaum imperialis itu sendiri, jaitu timbulnja kelas yang tidak lagi bersifat nasional, melainkan

sosial. Disinilah baru muntjul persoalan tentang kesadaran kelas. Namun persoalan ini dinegeri kita belum ada dan tidak perlu ada, asal sadja kita tidak mengchianati diri kita, jaitu tidak menentang kesadaran nasional kita sendiri, suatu kesadaran jang telah mentjakup bidang<sup>2</sup> sosial dan kebudajaan. Djika kita boleh mengatakan dengan singkat, kebudajaan nasional berlangsung dalam proses revolusionair kita menentang imperialisme modern itu, menentang kapitalisme asing dan perlu ditjatat, bahwa kita belum memiliki kapitalisme nasional, tanda<sup>2</sup>njapun, bahwa kita akan memiliki kapitalisme nasional itu, tidak ada, karena UUD kita setjara implisit menutup kemungkinan akan berkembangnja ekonomi liberal. Oleh karena itu dalam kondisi politik jang sedemikian kita hanya mempunjai satu konsep kebudajaan, jaitu konsep nasional. Ini toh tidak akan dimengerti oleh siapa jang tidak mengerti kepada kesadaran nasional kita. Memang sukarlah dibayangkan bagi siapa jang belum pernah ikut mengambil bagian dalam perdjjuangan nasional kita, in concrete dalam revolusi nasional kita, untuk mengerti akan perkembangan masyarakat kita sekarang. Djika kita memang tidak pernah turut dalam revolusi nasional ini, maka untuk mengerti makna kebudajaan nasionalpun adalah suatu kesukaran pula. Djika kita berdiri diluar revolusi nasional, baik sebagai penentang, pangedjek, maupun penonton, maka suatu konsep nasional tentang kebudajaan adalah suatu hal jang ridicule. Tetapi perlu disini diperingatkan, bahwa pun bagi siapa jang turut bergolak dalam revolusi nasional tidak berdasarkan kesadaran nasional, melainkan oleh perasaan takut ataupun ikut<sup>2</sup>an sadja, iapun tidak akan mengerti kepada nilai kebudajaan nasional. Ia akan mentjari pegangan lain, jang setjara psikologik telah mendesaknja keluar garis revolusi nasional, dan sekalipun dapat diutjapkanja berulang kali perkataan kesadaran nasional itu perkataan tersebut tidaklah mengandung hikmah sama sekali.

#### KEBUDAJAAN DILUAR KEBUDAJAAN ?

Meskipun demikian, bagi siapa jang kesadarannya mempunjai kearah nasional sebagai kita lukiskan tadi, haruslah mengerti, bahwa kesadaran nasional sebagai kesadaran kebudajaan mengandung masalah<sup>2</sup> jang harus dibahas dengan sungguh<sup>2</sup>. Apakah kebudajaan nasional itu mengandung implikasi, bahwa kita harus kembali kepada djaman<sup>2</sup> kebudajaan bangsa kita dahulu? Dengan sangat ber-hati<sup>2</sup> kita mentjoba memberikan djawaban, bahwa kesadaran nasional kita sebagaimana dirumuskan pada 20 Mei 1908 itu adalah suatu antitesis terhadap pendjadjahan sebagai proses sedjarah jang bersifat madju bagai arus gelombang jang tidak mengulangi dirinja. Oleh sifatnja jang madju itulah maka kebudajaan nasional tidak terkuntji dalam sel jang sempit dan gelap, melainkan bergolak tak terbatas bagaikan ombak dan gelombang samudera. Akan tetapi haruslah ditegaskan, bahwa kebudajaan nasional kita itu walaupun merupakan proses sedjarah bangsa kita, namun in sensu stricte tidaklah sama dengan proses sedjarah kita itu, kebudajaan nasional kita itu bukanlah ekspresi revolusi bangsa kita, melainkan ekspresi dari ekspresi revolusi bangsa kita sedjak kesadaran nasional itu kita miliki. Oleh karena dasarnya adalah kesadaran nasional itu kita tidak mengurung diri kita diantara tembok<sup>2</sup> perbatasan jang fiktif itu, melainkan sebagaimana kesadaran itu mempunjai kearah kebudajaan nasional kita itupun memiliki nilai<sup>2</sup> universal, mengingat, bahwa kebudajaan nasional kita itu tidak hanya melangsungkan dirinja dalam sedjarah bangsa kita se-mata<sup>2</sup>, melainkan djuga dalam sedjarah dunia. Bukankah tjita<sup>2</sup> kemerdekaan kita jang kini masih kita realisasikan itu mempunjai hubungan erat dengan revolusi<sup>2</sup> diluar tanah-air kita sebagai revolusi Perantjis, revolusi Amerika, revolusi Rusia, revolusi Tiongkok, dsb? Teranglah, bahwa kebudajaan nasional kita itu tidak bertentangan dengan sedjarah dan djustru merupakan momen<sup>2</sup> penting

dari sedjarah jang bersifat maju itu. Djika kita telah menjelami hakikat kemadjuan sedjarah jang mendukung kebudajaan nasional kita sebagai momen<sup>2</sup>nja, maka pastilah kita dengan sendirinja akan meninggalkan pendirian kesadaran jang mentjoba membangun kebudajaan diluar sedjarah, dengan perkataan, mentjoba membangun kebudajaan diluar kebudajaan itu sendiri.

#### ACHIRJA : KEBUDAJAAN SEBAGAI PERKEMBANGAN

Kemadjuan sedjarah jang tidak mungkin dirintangi itu adalah evolusi dari sedjarah penguasaan alam. Oleh karena penguasaan alam itu merupakan realisasi manusia sebagai totalitas, dengan mana setiap keasingan diperanginja, maka arah kebudajaan itu menudju kepada nilai<sup>2</sup> universal. Akan tetapi ini tidak berarti, bahwa nilai<sup>2</sup> universal itu harus meniadakan nasionalisme, karena sebagaimana kita mengetahui dalam pengertian<sup>2</sup> nasionalisme berbagai bangsa dapat bertemu sebagai jang kita saksikan di Bandung ditahun 1955, meskipun pertemuan jang lebih wadjar dipastikan oleh djalannja sedjarah. Nilai<sup>2</sup> universal itu tampaknya memang tidak dapat diarahi djika kita mengingat, bahwa penguasaan<sup>2</sup> alam itu berbeda tjara<sup>2</sup>nja, sistem<sup>2</sup>nja. Akan tetapi pada hakikatnja antara tjara<sup>2</sup> jang ber-beda<sup>2</sup> itu terbentanglah suatu tali hubungan kemanusiaan jang berpusatkan pada suatu penguasaan alam diharidepan, dimana dunia ini akan merupakan realisasi-bersama terhadap nilai<sup>2</sup> kemanusiaan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh A. de Waelhens mungkin akan lebih daripada suatu utopia<sup>9)</sup>, akan tetapi kesanalah memang sedjarah itu menudjunja. Penguasaan alam itu, dan dalam hal ini kebudajaan adalah penguasaan alam jang autentik, memang dalam pelaksanaannja berlangsung dengan ber-beda<sup>2</sup>, akan tetapi nilai<sup>2</sup> jang diarahinja sama. Apakah itu bisa tertjapai, memang tidak mungkin, karena djika mungkin, hal itu akan bertentangan dengan sifat<sup>2</sup> sedjarah jang tidak ber-henti<sup>2</sup>nja itu. Namun, djika kebudajaan sebagai ekspresi hidup manusia jang berakarkan pada perburuhan dan bahasa itu tidak mungkin mentjapai tudjuan universal itu, bagaikan Sisypnos jang tidak mungkin naik membebaskan diri dari djurang, tetapi agak lebih maju mentjapai tudjuan itu pada kebudajaan dalam arti jang sekundair, jaitu tidak sebagai ekspresi hidup manusia, melainkan ekspresi hidup manusia, meskipun berbeda dalam tjara dan melahirkannja. Berbeda dengan kebudajaan dalam pengertian primair, maka kebudajaan dalam pengertian sekundair tidak ditjptakan setjara produktif, tidak dapat difabrikasikan, melainkan ditjptakan setjara poetik, setjara artistik, jang autentik, artinja djika kebudajaan itu diklisekan, maka klisenja bukanlah lagi kebudajaan dalam arti sekundair, melainkan kebudajaan dalam arti primair. Dengan pengertian jang sekundair ini djustru oleh tjoraknja jang tidak pragmatik itu lebih mungkin nilai<sup>2</sup> universal itu direalisasikannja, karena jang ditjarinja, baik oleh seni, ilmu, maupun agama, ialah kemanusiaan itu, ialah hakikat si manusia, tetapi tidak oleh seni jang pragmatik, tidak oleh ilmu jang pragmatik, tidak oleh agama jang pragmatik.

Demikianlah kebudajaan itu dengan bahasa jang lebih tepat dari rumus<sup>2</sup> logistika memangku funksinja dalam realisasi-bersama terhadap nilai<sup>2</sup>. Oleh karena itu tanpa protensi politik sedikitpun kebudajaan itu memilih tempatnja jang paling tepat, jaitu manusia sebagai totalitas, kemanusiaan dan kerakjatan jang semesta.

<sup>9)</sup> A. de Waelhens, *De Mens en de Cultuur*, sebuah referat jang diutjapkan di Brussel dalam bulan April 1958, dan telah diterbitkan dengan djudul "Den Mens" ber-sama<sup>2</sup> referat<sup>2</sup> Strasser, Dondeyne, dll. oleh Penerbit Spectrum di Utrecht dan Antwerpen dalam tahun itu djuga. Lih. selandjutnja p. 68.